

Kebijakan Pendidikan pada Lembaga Islam Nonformal: Studi Kasus Rumah Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional

Firsi Ilsa Kurniaristha*

Program Studi Magister, Jurusan Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Kota Pontianak, 78122. Indonesia

*Corresponding Author: firsi@pascasarjana.iainptk.ac.id

Article History

Received : April 07th, 2026

Revised : April 27th, 2026

Accepted : May 14th, 2026

Abstract: Pendidikan Islam nonformal memiliki peran strategis dalam memperkuat karakter dan nilai spiritual peserta didik di tengah tantangan globalisasi. Namun, kajian mengenai kebijakan lembaga sebagai instrumen pengatur dalam konteks ini masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid serta relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional dalam perspektif teori sosial Thomas Hobbes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lembaga diimplementasikan secara sistematis melalui tiga pilar utama, yaitu tahsin, tahfidz, dan muraja'ah, yang berorientasi pada kualitas bacaan, internalisasi nilai, dan pembentukan karakter. Implementasi kebijakan dilakukan secara fleksibel dan humanis, didukung metode pembelajaran variatif serta evaluasi berkala, dan terbukti relevan dengan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam pembentukan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai bentuk otoritas yang menciptakan keteraturan pendidikan secara persuasif dan humanis, serta berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Indonesia, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Al-Qur'an, Pendidikan Islam Nonformal, Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam membentuk kualitas manusia dan peradaban suatu bangsa. Dalam konteks diskursus kontemporer, pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai upaya sistematis dalam membentuk karakter, nilai, dan orientasi hidup peserta didik secara holistik. Di Tengan arusnya globalisasi yang memicu krisis moral dan identitas, lembaga pendidikan Islam nonformal seperti Rumah Qur'an muncul sebagai entitas strategis yang tidak hanya memperkuat fondasi spiritual, tetapi juga menjadi pelengkap bagi sistem pendidikan formal. Fenomena ini tercermin dari sebuah tren signifikan pertumbuhan lembaga pendidikan Al-Qur'an di Indonesia yang mencoba menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis nilai agama.

Dalam perspektif pendidikan Islam, proses ini memiliki dimensi yang lebih komprehensif

karena tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan moral sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti rumah Qur'an hadir sebagai alternatif yang berperan strategis dalam memperkuat fondasi keislaman sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat (Perkakas et al., 2026). Secara empiris, perkembangan lembaga pendidikan nonformal berbasis Islam di Indonesia menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini, di tengah arus globalisasi. Lembaga seperti rumah Qur'an mampu menjadi pelengkap bagi sistem pendidikan formal, terutama dalam penguatan aspek religiusitas dan karakter peserta didik (Ristanti et al., 2019). Selain itu juga, fenomena ini sejalan dengan trend global yang menekankan pendidikan berbasis nilai atau value based

education sebagai bentuk respon terhadap krisis nya moral dan identitas (Mehta, 2022).

Namun demikian, dinamika perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi pengelolaan, kualitas pembelajaran, maupun relevansinya dengan sistem pendidikan nasional. Salah satu permasalahan yang utama adalah bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam lembaga rumah Qur'an bisa relevan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta cakap dan bertanggung jawab (Sumber: Peraturan.BPK). Dalam hal ini, diperlukan sebuah analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan internal dalam sebuah pendidikan Islam nonformal diimplementasikan dan sejauh mana relevansinya dengan kerangka yuridis nasional.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti karena terdapat kecenderungan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan standar normatif yang ditetapkan oleh negara. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Abnisa dan Azis menyoroti bahwa banyak lembaga nonformal yang masih terjebak oada persoalan manajemen dan kurikulum yang terisolasi dari sistem nasional (Abnisa & Azis, 2025). Dalam penelitian yang lain lebih menekankan pada peran kepemimpinan yang profesional dalam keberhasilan Lembaga. Di sinilah kita bisa lihat letak celah penelitian yang belum tersentuh, sementara itu literatur yang ada telah banyak mengkaji efektivitas pembelajaran Al-Qur'an dalam pembentukan karakter, kajian yang secara khusus menempatkan kebijakan lembaga sebagai instrument pengatur dalam kerangka sistem pendidikan nasional masih sangat terbatas. Kebanyakan studi masih bersifat deskriptif dan belum mampu menangkap secara khusus yang berkaitan dengan bagaimana otoritas kebijakan internal dapat bernegosiasi dengan standar yuridis negara untuk menciptakan stabilitas institusional.

Studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek implementasi pembelajaran, manajemen lembaga, atau peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik mengaitkan kebijakan internal lembaga rumah Qur'an dengan tujuan pendidikan nasional dalam perspektif yuridis. Selain itu, pendekatan teoritis

yang digunakan juga cenderung belum mengintegrasikan analisis kebijakan dengan pendekatan teori sosial secara mendalam. Hal ini menunjukkan sebuah kebijakan menjadi kunci utama dalam menentukan kualitas dan relevansi sebuah lembaga pendidikan tersebut. Keterbaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah sebuah integrasi analisis kebijakan pendidikan berbasis kerangka yuridis nasional UU No. 20 Tahun 2003 dengan persepektif teori sosial Thomas Hobbes. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan pedagogis murni, bukan sekedar sebagai aturan teknis, melainkan sebagai bentuk otoritas yang esensial.

Hobbes menekankan bahwa keteraturan sosial hanya dapat tercapai melalui adanya otoritas yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu demi terciptanya stabilitas (Lloyd & Sreedhar, 2018). Dari sini menurut pemikiran Hobbes, keteraturan sosial hanya dapat terwujud melalui adanya sebuah otoritas yang mampu mengendalikan perilaku individu demi stabilitas bersama, sebuah kondisi inilah yang disebut dengan jalan keluar ketidakteraturan. Teori ini mampu menjelaskan apa kebijakan yang kuat dan sistematis seperti pilar Tahsin, tahfidz, dan muraja'ah, sebuah lembaga nonformal akan kehilangan arah dan konsistensi dalam mencapai target kompetensi peserta didik. Melalui perspektif Hobbes, kebijakan Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid diposisikan sebagai mekanisme "kontrak sosial" internal yang menjamin efektivitas pembelajaran sekaligus menyelaraskan tujuan lembaga yang mandat yuridis nasional. Dalam dunia pendidikan, kebijakan lembaga dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang membantu berjalannya proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mengkaji kebijakan yang ada di Rumah Qur'an Ulumul Qur'an At-Tauhid penting untuk melihat sejauh mana aturan tersebut bisa menciptakan suasana yang tertit, berjalan secara efektif, dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid dijalankan, bagaimana relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003, serta bagaimana otoritas kebijakan tersebut diinterpretasikan melalui kacamata Thomas Hobbes untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil dan terarah,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan kajian kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif interdisipliner, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, sistematis, dan selaras dengan sistem pendidikan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid dalam konteks nyata kehidupan lembaga. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan situasi yang diteliti (Fadli, 2021).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid yang berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Srikandi 2, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki sistem kebijakan pembelajaran Al-Qur'an yang terstruktur melalui program tahsin, tahfidz, dan muraja'ah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas satu orang pengelola lembaga, dua orang tenaga pengajar, dan dua orang tua peserta didik. Teknik purposive sampling digunakan karena informan dianggap memahami secara langsung kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di lembaga (Alodia et al., 2021).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan observasi awal dan menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan lembaga, observasi

digunakan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa jadwal kegiatan, catatan perkembangan santri, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode (Rofiah & Bungin, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan, relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional, serta bentuk otoritas kebijakan dalam perspektif teori Thomas Hobbes (Rusandi & Rusli, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Lembaga sebagai Instrumen Otoritas Pendidikan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi sebagai struktur otoritas yang mengatur, mengarahkan, dan menstabilkan praktik pendidikan. Hal ini tampak dari sebuah konsistensi penerapan tiga pilar utama yaitu, tahsin, tahfidz dan muraja'ah yang tidak sekedar menjadi kurikulum, tetapi menjadi karangka normative yang mengikat perilaku belajar peserta didik.

Hal ini mencerminkan paradigma pendidikan Islam yang holistik. Tahsin adalah suatu cara membenaran atau memperbagus bacaan dengan memberikan hak-hak huruf beserta dengan sifatnya dan menjadi landasan wajib yang harus digunakan dalam membaca Al-Qur'an berupa ilmu tentang hukum-hukum dan kaidah-kaidah tajwid yang melekat padanya sehingga bacaan Al-Qur'an sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam (Fathah, 2021). Tahfidz adalah menjaga, memelihara, atau menghafal (Noer, 2021), Sedangkan murajaah adalah mengulang kembali yang sudah dihafal dan mempertahankan hafalan (Yusra, 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an harus mengintegrasikan

aspek pengetahuan, nilai, dan praktik sebagai satu kesatuan dalam pembentukan karakter (Hidayatullah et al., 2025).

Misalnya, peserta didik tidak diperkenankan menambah hafalan sebelum kualitas bacaan dinilai baik, serta setiap hafalan diupayakan peserta didik dapat memahami makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, kebijakan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid tidak hanya berorientasi pada capaian hafalan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Setelah dilakukan wawancara dengan salah satu tenaga pengajar, dalam praktiknya kebijakan tersebut telah dilaksanakan melalui pembelajaran yang terstruktur namun fleksibel, dengan pembagian waktu yang jelas antara tahsin, tahfidz, dan muraja'ah, serta penggunaan metode pembelajaran yang variatif seperti permainan edukatif, sambung ayat, dan hafalan berkelompok. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat kaku dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

Dari hasil penelitian ini juga memperkuat bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat memiliki peran strategis dalam penguatan karakter di tengah keterbatasan pendidikan formal. Studi menunjukkan bahwa pendidikan nonformal mampu menjadi ruang alternatif dalam membangun nilai moral dan literasi sosial di era modern (Nisa et al., 2025). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya orientasi kualitas dibanding kuantitas, yang sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara ilmu dan amal. Selain itu, sistem muraja'ah (pengulangan hafalan) yang terjadwal menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi capaian santri. Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga normatif, karena mengatur perilaku belajar santri secara berkelanjutan. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian pendidikan Islam kontemporer bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari internalisasi nilai dan perubahan perilaku.

Lebih jauh, kebijakan yang mengutamakan kualitas bacaan sebelum penambahan hafalan menunjukkan adanya orientasi pedagogis yang berlandaskan pada prinsip mastery learning. Mastery learning adalah pencapaian taraf

penguasaan minimal yang ditetapkan untuk setiap unit bahan pelajaran baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan kata lain apa yang dipelajari peserta didik dapat dikuasai sepenuhnya (Judrah, 2019). Dalam perspektif ini, peserta didik tidak didorong untuk sekadar mencapai target saja, tetapi memastikan penguasaan kompetensi secara mendalam sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Temuan ini memiliki implikasi yang penting, terutama dalam konteks pendidikan Al-Qur'an yang seringkali terjebak pada orientasi jumlah hafalan semata. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid dapat dipandang sebagai upaya korektif terhadap praktik pendidikan yang cenderung reduksionistik.

Pendekatan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa pendidikan Islam modern perlu mengintegrasikan kompetensi abad 21 tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman (Marzuqi & Ahid, 2023). Di sisi lain, aspek pembentukan karakter menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui pembiasaan sehari-hari, seperti disiplin waktu, kejujuran dalam setoran hafalan, tanggung jawab, serta adab terhadap guru dan lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa lembaga memandang keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian hafalan, tetapi juga dari kualitas akhlak peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis Al-Qur'an memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik (Ulfa, 2023).

Secara kritis, temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan lembaga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam skala mikro. Dalam perspektif Thomas Hobbes, kondisi tanpa otoritas akan melahirkan ketidakteraturan (state of nature), sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu mengendalikan tindakan individu demi terciptanya keteraturan kolektif (Llyod & Sreedhar, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid berfungsi sebagai otoritas pendidikan yang meniadakan proses pembelajaran dari fragmentasi dan inkonsistensi. Namun yang menarik dari sini adalah asumsi Hobbes yang cenderung melihat otoritas sebagai sesuatu yang bersifat koersif, tamuan penelitian ini justru menunjukkan transformasi bentuk otoritas menjadi persuasif dan humanis. Otoritas tidak hadir dalam bentuk tekanan, tetapi dalam bentuk bimbingan yang bertahap dan berorientasi pada kesadaran

internal santri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bahwa konsep otoritas Hobbesian dapat direkonstruksikan ke dalam konteks pendidikan sebagai soft authority, yaitu otoritas yang bekerja melalui internalisasi nilai, bukan paksaan.

Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih cenderung kepada kebijakan pendidikan Islam hanya sebagai aspek administrative atau kurikulum (Abnisa & Azis, 2025). Dalam penelitian ini, kebijakan justru diposisikan sebagai elemen sentral yang membentuk arah, budaya, dan stabilitas pendidikan. Kebijakan lembaga juga didukung oleh sistem koordinasi yang terstruktur melalui catatan perkembangan siswa perminggu dan rapat setiap semester. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat pengajar. Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diinternalisasikan dalam praktik kelembagaan secara berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan dalam Praktik Pendidikan

Implementasi kebijakan di Rumah Qur'an Ulumul Qur'an At-Tauhid dapat dilihat secara nyata dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga pengajar, pembelajaran dirancang secara terstruktur namun fleksibel, dengan pembagian waktu yang jelas antara tahsin, tahfidz, dan muraja'ah. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya target pembelajaran tanpa mengabaikan kondisi peserta didik. Dalam praktiknya, pengajar menerapkan pendekatan humanis dan persuasif, seperti tidak memaksakan target hafalan secara berlebihan serta memberikan motivasi secara bertahap. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan antusiasme santri terhadap proses pembelajaran. Santri menunjukkan respon positif terhadap metode pembelajaran yang variatif, seperti permainan edukatif, sambung ayat, dan hafalan berkelompok.

Temuan ini menguatkan penelitian yang menyatakan bahwa metode pembelajaran yang kreatif dan partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pendidikan Islam. Hal ini dapat menguatkan bahwa metode pembelajaran yang kreatif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, implementasi kebijakan juga tercermin dalam integrasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran. Nilai disiplin,

kejujuran, dan tanggung jawab tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi ditanamkan melalui pembiasaan sehari-hari, seperti datang tepat waktu, menyusun sandal, serta konsistensi dalam muraja'ah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan berlangsung secara holistik, mencakup aspek kognitif dan afektif sekaligus.

Dalam aspek pembentukan karakter, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab diinternalisasikan melalui pembiasaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak diajarkan secara teoritis, melainkan melalui praktik langsung yang berulang. Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep hidden curriculum yaitu kurikulum yang tidak menjadi bagian yang harus dipelajari, yang digambarkan sebagai aspek yang ada di sekolah diluar kurikulum tertulis, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi, serta perilaku siswa (Khoiriah & Deriwanto, 2022) yang dimana nilai-nilai pendidikan ditransmisikan melalui budaya dan kebiasaan yang hidup dalam lingkungan pendidikan.

Selain itu, temuan mengenai pembentukan karakter melalui pembiasaan (hidden curriculum) juga memiliki relevansi kuat dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan Islam nonformal berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter religius anak dan remaja (Wibowo & Darodjat, 2025). Dalam penelitian ini, nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab tidak diajarkan secara verbal semata, tetapi ditanamkan melalui praktik keseharian. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan karakter sangat bergantung pada konsistensi lingkungan dan keteladanan, bukan hanya kurikulum formal.

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui catatan perkembangan mingguan dan laporan (rapor) tahunan. Sistem ini memungkinkan pemantauan perkembangan peserta didik secara komprehensif dan berkelanjutan. Dari perspektif orang tua, implementasi kebijakan lembaga dinilai cukup konsisten dengan visi yang ditetapkan. Orang tua juga merasakan adanya perubahan signifikan pada aspek ibadah, akhlak, dan kedisiplinan anak. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui komunikasi rutin menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan dan

keluarga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan karakter (Bancin et al., 2025).

Namun hal ini terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran dan perbedaan kemampuan setiap peserta didik. Namun hal ini dapat diatasi melalui, pendekatan individual serta efisiensi metode pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan tanpa mengabaikan tujuan utama. Jika dikaitkan dengan dinamika global, pendekatan yang digunakan oleh Rumah Qur'an At-Tauhid juga menunjukkan relevansi dengan tren pendidikan Islam modern yang mulai mengintegrasikan metode kreatif dan inovatif. Penelitian internasional menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan interaktif seperti gamifikasi dalam pembelajaran Al-Qur'an dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik secara signifikan (Uriawan et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan penggunaan metode variatif seperti permainan edukatif dan hafalan berkelompok untuk meningkatkan antusiasme santri.

Relevansi Kebijakan dengan Tujuan Pendidikan Nasional

Jika dianalisis dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan yang ditetapkan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid menunjukkan relevansi yang kuat, baik secara normatif maupun substantif. Tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia tercermin secara nyata dalam praktik pendidikan di lembaga nonformal ini. Penekanan pada kualitas bacaan sebelum penambahan hafalan menunjukkan adanya orientasi pada ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan, yang merupakan bagian dari pembentukan karakter.

Sementara itu, pembiasaan ibadah, interaksi intensif dengan Al-Qur'an, serta penanaman adab dalam kehidupan sehari-hari menjadi wujud konkret dari upaya membentuk keimanan dan ketakwaan peserta didik. Lebih jauh, kebijakan lembaga juga tidak bersifat eksklusif dalam aspek keagamaan semata, tetapi menunjukkan keterbukaan terhadap kebutuhan zaman. Upaya lembaga dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan adaptasi terhadap teknologi menunjukkan bahwa pendidikan yang diterapkan tidak bersifat

eksklusif, tetapi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Temuan dari orang tua memperkuat analisis ini, yang dimana mereka merasakan adanya perubahan yang signifikan pada aspek ibadah, akhlak, dan kedisiplinan anak. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan lembaga tidak hanya relevan secara konseptual dengan tujuan pendidikan nasional, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan peserta didik. Dengan demikian, Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid dapat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan secara holistic, khususnya dalam penguatan aspek karakter dan spiritual yang seringkali belum optimal dalam pendidikan formal.

Otoritas Kebijakan dalam Perspektif Thomas Hobbes

Dalam perspektif teori sosial Thomas Hobbes, kebijakan lembaga dapat dipahami sebagai bentuk "otoritas" yang berfungsi menciptakan keteraturan dalam sistem pendidikan. Hobbes menekankan bahwa tanpa adanya aturan yang jelas, individu cenderung bertindak secara bebas tanpa arah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan (Llyod & Sreedhar, 2022). Thomas Hobbes mengatakan bahwa sebuah keteraturan dalam suatu sistem hanya dapat terwujud melalui adanya otoritas yang mampu mengatur dan mengendalikan perilaku individu. Tanpa adanya otoritas, individu cenderung bertindak secara bebas tanpa arah, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini dapat diibaratkan sebagai sebuah proses pembelajaran yang tidak memiliki arah, standar, dan konsistensi.

Keteraturan tersebut terlihat dari adanya aturan pembelajaran, sistem evaluasi, serta pembiasaan yang konsisten. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa teori Hobbes relevan untuk menjelaskan pentingnya kebijakan sebagai instrumen dalam menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam lembaga pendidikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan di Rumah Ulumul Qur'an At-Tauhid berfungsi sebagai bentuk otoritas yang menciptakan keteraturan dalam proses pendidikan. Tiga pilar utama yaitu tahsin, tahfidz, dan muraja'ah dapat dipahami sebagai struktur

yang mengikat sekaligus mengarahkan perilaku belajar peserta didik. Kebijakan tersebut menjadi semacam “kontrak sosial” internal yang disepakati dan dijalankan oleh seluruh elemen yang ada dilembaga, baik dari pengelola, guru, maupun peserta didik.

Namun demikian, yang menarik dari temuan penelitian ini adalah bahwa otoritas tersebut tidak dijalankan secara represif, melainkan dikombinasikan dengan pendekatan humanis. Hal ini menunjukkan adanya transformasi konsep otoritas dari yang bersifat koersif menjadi persuasif. Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sistem yang menata, mengarahkan, dan menjaga keberlangsungan proses pendidikan. Kebijakan lembaga menjadi instrument yang memastikan bahwa setiap proses berjalan secara konsisten dan terarah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pemahaman tentang penerapan teori Thomas Hobbes dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan Islam nonformal.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran dan perbedaan kemampuan santri. Tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak selalu berjalan ideal, tetapi memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Namun, justru dalam konteks inilah terlihat fleksibilitas dan resiliensi lembaga dalam mengelola dinamika pendidikan. Hal ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi dalam menghadapi realitas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Rumah Ulumul Qur’an At-Tauhid memiliki kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan pendidikan Islam dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan perspektif yuridis dan teori sosial klasik. Sementara itu, secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih adaptif, humanis, dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional

KESIMPULAN

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas pemahaman tentang kebijakan pendidikan dengan mengintegrasikan perspektif teori sosial Thomas Hobbes, di mana kebijakan diposisikan sebagai bentuk otoritas yang menciptakan keteraturan dalam sistem pendidikan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa otoritas tersebut mengalami transformasi menjadi lebih persuasif dan humanis, sehingga tidak bersifat koersif, melainkan mendorong kesadaran internal peserta didik. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya reposisi lembaga pendidikan Islam nonformal sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih adaptif dan integratif agar lembaga semacam ini dapat terus berkembang dan berkontribusi secara berkelanjutan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional secara holistik..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pengelola dan para guru di Rumah Ulumul Qur’an At-Tauhid yang telah memfasilitasi peneliti untuk melakukan penelitian di Rumah Ulumul Qur’an At-Tauhid.

REFERENSI

- Abnisa, A. P., & Azis, A. (2025). Tantangan dan Solusi Manajemen Pendidikan Islam di Era Modern. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 11(1), 64–71.
- Farihin. (2021). Multicultural-based Education for Madrasah Ibtidaiyah Students During Covid-19 Pandemic. *Dinamika Ilmu*, 21(2), 501–518.
- Fauzi, N., Rusdin, & Akmal. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD / MI. *Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 73–79.
- Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (2nd ed). Teachers College Press.
- Hakim, D. (2022). Internalization Of Multicultural Values In The Learning Procces Of Islamic Religious Education. *Journal Education Multicultural of Islmaic Society*, 2(2), 137–159.

- Huda, M. M., Maftuh, B., & William, N. (2023). Urgensi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial Sejak Dini Pendahuluan. *Jurnal Elementaria Edukasi*, 6(2), 1015–1022.
<https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5576>
- Jannatiah. (2023). Pendidikan Multikultural di Madrasah. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 1(1), 28–36.
- Kurdi, M. S. (2023). Dampak Pendidikan Multikultural Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (Morfologi)*, 1(4), 215–244.
- Lestari, T. D., & Sa'adah, N. (2021). Pendidikan Multikultural Solusi Atas Konflik Sosial: Indikasi Intoleran dalam Keberagaman. *Jurnal Sosiologi Humanis*, 6(2), 140–154.
- Lloyd, S. . ., & Sreedhar, S. (2018). Stanford Encyclopedia of Philosophy Hobbes ' s Moral and Political. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 1–20.
- Masyitoh, S., & Muhammad, S. (2024). School and Sociology of Religious Education: Practice Study of Internalizing Multicultural Values. *Jurnal Indo-Islamika*, 14(1), 136–152.
- Mehta, K. (2022). Value Of Value Based Education! *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 18(2), 88–95.
- Ningtyas, D. W. (2024). Peran Guru Dalam Pendidikan Multikultural Membentuk Karakter Peserta Didik di Era Society 5.0. *Jurnal MIPA Dan Pembelajarannya*, 4(3).
<https://doi.org/10.17977/um067.v4.i3.2024.3>
- Perkakas, E. Z., Asrini, & Halim, A. (2026). Pendirian Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ) Berbasis Kolaborasi Melalui Program Pengabdian di Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UM Jambi*, 3(1), 117–127.
- Ristanti, I., Subhan, K. F., Nissa, K., & Eviani, N. (2019). Digitalisasi Perencanaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1–50.
- Riyanti, A., & Novitasari, N. (2021). Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 3(1), 29–35.
- Suruambo, J., Alim, J., & Indrawan, Y. (2025). Efektivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Multikultural di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 5(3), 1166–1176.
- Topan, A., & Abdullah, A. F. A. (2025). Pendidikan Multikultural dalam Mendukung Penguatan Moderasi Beragama: Tinjauan Historis. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 665–668.
- Wati, R. E., Kusmaningrum, D. E., & Juharyanto. (2024). Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya dalam Menginternalisasi Sikap Toleransi Siswa. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(11), 10.17977/um065.v4.i11.2024.19.
<https://doi.org/10.17977/um065.v4.i11.2024.19>
- Widiatmaka, P., Hidayat, M. Y., Yapandi, & Rahngang. (2022). Pendidikan Multikultural dan Pembangunan Parakter Toleransi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 09(02), 119–133.
- Zulyana, N., Oktavianti, I., & Rondli, W. S. (2025). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 297–310.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32249>